

Kritik Sosial Terhadap Praktik Pendidikan Dalam Film “Laskar Pelangi”

Nanang Martono

FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
email: nanang_martono@yahoo.co.id

Abstrak: Artikel ini merupakan analisis mengenai kritik terhadap praktik pendidikan di Indonesia. Kritik ini lebih didasarkan pada alur cerita yang disampaikan dalam film “Laskar Pelangi” (LP). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis esensi film LP yang dilihat melalui kaca mata sosiologi. Esensi film lebih difokuskan pada kritik sosial yang disampaikan melalui film ini. Secara teoritis, pendidikan memiliki dua fungsi yang saling bertentangan. Menurut perspektif fungsional, pendidikan berfungsi positif untuk mentransmisikan nilai-nilai antargenerasi. Sebaliknya, perspektif konflik menjelaskan bahwa pendidikan justru menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Perspektif interaksionisme simbolik lebih melihat pada bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam proses pendidikan saling berhubungan. Beberapa kritik yang disampaikan di antaranya adalah mengenai proses pendidikan formal yang meninggalkan hakikat pendidikan itu sendiri, eksklusifitas fungsi sekolah, formalisasi pendidikan, ketidakmerataan akses pendidikan bagi masyarakat kelas bawah yang menyebabkan ketidaksetaraan sosial, otonomi pendidikan yang sepenuhnya belum otonom serta dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit. Kondisi-kondisi inilah yang mewarnai dinamika pendidikan nasional sampai saat ini yang telah menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan sosial.

Kata Kunci: *laskar pelangi, kritik sosial, pendidikan, dan ketidaksetaraan sosial.*

Abstract: This article is an analysis of the criticisms of the practice of education in Indonesia. This criticism is based on the storyline presented in the “Laskar Pelangi” (LP) movie. This article aims to analyze the essence of the LP movie seen through the sociological perspective. The essence of the film is more focused on social criticism conveyed through this film. Theoretically, education has two conflicting functions. According to the functional perspective, the positive function of education are transmit values across generations. Instead, the conflict perspective to explain that education actually leads to social inequality. More symbolic interactionism perspective see how the actors involved in the education process related to each other. Some of the criticism is delivered in between the formal education process that leaves the essence of education itself, the exclusivity of school functions, the formalization of education, inequality of access to education for lower-class society that cause social inequality, educational autonomy have not fully autonomous and the dichotomy of your favorite school and favorite. These conditions that characterize the dynamics of national education so far has led to social inequality.

Key words: *laskar pelangi, social criticism, education, and social inequality.*

Pendahuluan

Pendidikan pada hakikatnya merupakan sebuah proses bagi seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk masa depannya. Namun, proses pendidikan yang selama ini dijalankan, seolah telah tercerabut dari hakikat pendidikan itu sendiri. Pendidikan semata-mata dilakukan hanya untuk mencapai kehidupan yang layak (mencari pekerjaan), mendapatkan penghargaan atau sekadar untuk melanggengkan status. Pandangan yang tidak

sepenuhnya salah tersebut sudah mengakar dalam pemikiran sebagian besar bahkan semua orang.

Keberhasilan seseorang dalam mencapai pendidikan tinggi, hanya dikaitkan dengan keberhasilan mereka memperoleh selebar ijazah yang nantinya dapat “dijual” untuk memperoleh pekerjaan yang “layak” menurut persepsi mereka. Masyarakat pun sering membenarkan persepsi tersebut. Seorang lulusan sarjana yang berkerja tidak sesuai bidang, tidak berprestasi atau tidak

berseragam, sering kali mendapat cemoohan masyarakat. Kualitas individu hanya ditunjukkan dengan selembar ijazah. Akibatnya, sering muncul persepsi “*dengan selembar ijazah, kita dapat meraih segalanya*”.

Praktik pendidikan nasional terkesan eksklusif, hanya segelintir orang saja yang dapat menikmati, terutama untuk jenjang pendidikan menengah. Hal ini dapat dilihat melalui data berikut:

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah (APK) (%)

Usia (tahun)	2006	2007	2008
7-12	97,39	97,60	97,83
13-15	84,08	84,26	84,41
16-18	53,92	54,61	54,7

Sumber: BPS, 2008a

Tabel 2. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas (%)

Jenjang Pendidikan	2006	2007
Tidak/Belum Tamat Sekolah	7,43	7,57
Tidak/Belum Tamat SD	20,77	20,37
SD (Sekolah Dasar)	31,67	31,19
SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)	17,56	17,49
SM (Sekolah Menengah) ke Atas	22,56	23,37

Sumber: BPS, 2008b.

Tabel 1 menunjukkan bahwa semakin tinggi usia penduduk, maka semakin rendah APK. Hal ini lebih disebabkan mahalnya biaya sekolah pada jenjang sekolah yang tinggi. Hanya penduduk dari kelas atas saja yang mampu menempuh pendidikan sampai usia 16 sampai 18 tahun. Data ini diperkuat dengan data pada Tabel 2 yang menunjukkan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 10 tahun ke atas. Semakin tinggi jenjang sekolah, maka persentase jumlah penduduk yang menempuh pendidikan semakin rendah.

Pembedaan sekolah negeri-swasta mengakibatkan *image* negatif di masyarakat umum yang mengingkari kualitas sekolah swasta. Sekolah berkualitas sering diidentikkan dengan tampilan visual yang mencerahkan harapan. Fasilitas luks,

seragam elit, gedung sekolah yang berpagar megah dan bertingkat merupakan simbol sekolah berkualitas. Sekolah berkualitas adalah sekolah yang mahal, sebuah persepsi yang tidak selamanya benar.

Kritik mengenai praktik-praktik pendidikan semacam ini sering disampaikan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui buku-buku maupun surat kabar terkenal sekalipun. Kritik tersebut diharapkan mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap praktik pendidikan yang tidak sepenuhnya benar, bahkan jauh dari idealitas. Andrea Hirata, seorang novelis, mencoba memberikan kritik mengenai praktik pendidikan melalui jalur berbeda. Ia menggunakan novel sebagai instrumen untuk mengubah persepsi masyarakat tersebut. *Laskar Pelangi* (LP), merupakan novel karya Andrea Hirata yang mencoba mengembalikan pandangan masyarakat kepada hakikat pendidikan itu sendiri, sebagai mekanisme untuk meraih ilmu pengetahuan. Ide cerita dalam novel LP yang mendapat label “Best Seller”, diangkat dalam film layar lebar dengan judul yang sama pada tahun 2008. Film LP berkisah tentang perjuangan dua orang guru SD Muhammadiyah dan sepuluh muridnya untuk bertahan dalam mendapatkan pendidikan. Film ini mengambil *setting* kehidupan masyarakat di pulau Belitung (Kepulauan Bangka Belitung) di pertengahan 1970-an.

Film ini syarat dengan kritik sosial yang berkaitan dengan praktik pendidikan di tanah air. Film LP menggambarkan kondisi pendidikan nasional yang terjadi di era 70-an yang ternyata, gambaran tersebut masih mewarnai praktik pendidikan di era sekarang. Artikel ini membahas mengenai bagaimanakah kritik sosial yang disampaikan dalam film LP ini dari sudut pandang sosiologi? Artikel ini bertujuan untuk menganalisis esensi film LP yang dilihat melalui kaca mata sosiologi pendidikan. Esensi film lebih difokuskan pada kritik sosial yang disampaikan melalui film ini, sehingga diharapkan masyarakat luas dapat memaknai hakikat pendidikan yang sebenarnya melalui media film ini.

Film LP merupakan film yang syarat dengan kritik sosial mengenai praktik pendidikan di tanah air. Film LP menggambarkan kondisi pendidikan nasional yang terjadi di era 70-an yang ternyata,

gambaran tersebut masih mewarnai praktik pendidikan di era sekarang. Artikel ini membahas mengenai bagaimanakah kritik sosial yang disampaikan dalam film LP ini dari sudut pandang sosiologi?

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis esensi film LP yang dilihat melalui kaca mata sosiologi pendidikan. Esensi film lebih difokuskan pada kritik sosial yang disampaikan melalui film ini, sehingga diharapkan masyarakat luas dapat memaknai hakikat pendidikan yang sebenarnya melalui media film ini.

Tinjauan Literatur dan Pembahasan

Perspektif Sosiologi tentang Pendidikan

Perspektif sosiologis memfokuskan kajian pada proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Perspektif menurut Meighan (1981) merupakan "*frame of reference, a series of working rules by which a person is able to make sense of complex and puzzling phenomena*". Bagi seorang sosiolog, fenomena merupakan kehidupan sosial dan diadopsi sebagai bagian dari sikap ataupun penilaian terhadap kehidupan sosial. Ada tiga perspektif dasar dalam sosiologi, yaitu: perspektif fungsional, konflik dan interaksionisme simbolik.

Perspektif Fungsional. Para analis fungsional, melihat *fungsi* serta kontribusi yang positif lembaga pendidikan dalam memelihara atau mempertahankan keberlangsungan sistem sosial. Durkheim dan Parsons (dalam Haralambos dan Holborn, 2004) misalnya, menjelaskan bahwa pendidikan berfungsi untuk mentransmisikan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Pada masyarakat industri yang kompleks, sekolah berfungsi untuk menyiapkan fungsi yang tidak dapat diberikan oleh institusi yang lain, seperti keluarga atau kelompok sebaya. Kenggotaan dalam keluarga, didasarkan atas prinsip kekerabatan, kenggotaan dalam kelompok sebaya, didasarkan atas prinsip pilihan personal. Akan tetapi, keanggotaan dalam masyarakat secara keseluruhan, tidak didasarkan atas prinsip-prinsip tersebut. Nilai-nilai universal ditanamkan melalui institusi sekolah, sehingga keutuhan (kelanggengan) sistem sosial dapat dipertahankan. Durkheim (dalam Henslin, 2006) berargumen bahwa pendidikan pengajaran keterampilan

husus bagi individu sangat dibutuhkan untuk pekerjaannya di masa mendatang. Fungsi ini merupakan bagian penting dalam masyarakat industri yang semakin kompleks dan menspesialisasikan pembagian kerja.

Perspektif Konflik. Perspektif konflik lebih melihat pada proses ketidaksetaraan (*inequality*) sosial yang disebabkan oleh institusi pendidikan. Institusi pendidikan dalam praktiknya telah melakukan -apa yang dinamakan- proses reproduksi sosial. Proses ini menunjuk pada kenyataan bahwa lembaga pendidikan membantu dipertahankannya pembagian sosial dalam masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya (Henslin, 2006). Anak seorang miskin, meskipun ia mampu mengenyam pendidikan, pada akhirnya ia juga akan tetap menjadi orang miskin pula. Bowles dan Gintis (dalam Haralambos dan Holborn, 2004) memandang bahwa hal ini lebih disebabkan oleh perbedaan latar belakang keluarga antara orang miskin dan orang kaya. Menurut hasil studi yang dilakukan Bowles dan Gintis (dalam Haralambos dan Holborn, 2004), mereka menemukan adanya korelasi antara latar belakang keluarga dengan keberhasilan pendidikan. Anak dari keluarga kaya lebih banyak dan lebih mampu meraih akses pendidikan dengan lebih mudah bila dibandingkan anak dari keluarga miskin. Ketika anak dari keluarga miskin mendapat kesempatan yang sama dengan anak dari keluarga kaya (adanya sistem meritokrasi), selalu saja ketidaksetaraan ini akan terjadi.

Perspektif Interaksionisme Simbolik. Perspektif ini lebih menekankan pada proses pendidikan dari sisi mikro dengan melihat proses interaksi antarpihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Bagi kaum interaksionis, pandangan terhadap diri sendiri atau konsep diri (*self concept*) diproduksi oleh interaksi diri kita dengan orang lain. Konsep-diri siswa juga dipengaruhi oleh siswa yang lain, oleh guru melalui interaksi. Menurut perspektif ini, dengan mengembangkan konsep-diri memiliki efek yang signifikan terhadap prestasi pendidikan (dalam Haralambos dan Holborn, 2004). Salah satu aspek penting dalam perspektif interaksionisme simbolik adalah memfokuskan pada cara atau upaya yang digunakan guru untuk merasakan serta memberikan respon perilaku siswa (Henslin, 2006). Bagai-

mana guru memperlakukan serta memberikan motivasi dan harapan pada siswanya merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan.

Ketiga perspektif tersebut memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisis praktik pendidikan. Perspektif fungsional lebih banyak melihat fungsi positif lembaga pendidikan, sedangkan perspektif konflik justru melihat bahwa pendidikan berfungsi negatif karena menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan sosial. Kedua perspektif tersebut memang sangat relevan untuk menggambarkan praktik-praktik pendidikan dewasa ini. Kedua fungsi tersebut, diakui atau tidak akan selalu berjalan beriringan. Perspektif interaksionisme simbolik berangkat dari sudut pandang yang berbeda dengan melihat hubungan atau interaksi antarkomponen dalam pendidikan. Interaksi ini memberikan pengaruh dalam menentukan keberhasilan individu. Untuk itu, aspek interaksi tersebut harus menjadi perhatian utama dalam proses pendidikan. Bagaimana guru memposisikan murid, bagaimana mereka saling berkomunikasi merupakan beberapa aspek penting.

Melepaskan Belenggu Sekolah Formal

Ivan Illich merupakan tokoh yang secara keras mengkritik formalisasi sekolah yang dilakukan oleh masyarakat. Bagi Illich, sekolah (formal) tidak berbeda dengan institusi agama (gereja) yang memaksakan ajarannya kepada masyarakat. Sekolah (formal) memposisikan dirinya sebagai satu-satunya lembaga yang mampu membawa individu pada kesuksesan berupa status, kepandaian, keberhasilan meraih kerja dan sebagainya. Bagi Illich, proses pendidikan tidak dapat disamakan dengan institusi sekolah, karena pendidikan tidak sama dengan persekolahan (Illich, 2000).

Sistem pendidikan menurut Illich harus direformasi. Menurut Illich (2000), masyarakat masih mempercayai mitos-mitos seputar sekolah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: pertama, mitos nilai terlembaga. Masyarakat belajar untuk membutuhkan sekolah; belajar yang bernilai adalah hasil kehadiran kita di kelas; nilai yang meningkat diukur dari ilmu pengetahuan yang diperoleh; nilai-nilai dapat diukur dan dicatat

melalui gelar dan ijazah. Kedua, mitos tentang pengukuran nilai. Sekolah menginisiasi siswa ke dalam dunia mereka bahwa segala hal adalah dapat diukur, termasuk prestasi siswa; sekolah membagi berbagai mata pelajaran yang hasilnya dapat diukur dengan standar internasional. Ketiga, mitos pemaketan nilai-nilai: sekolah menjual kurikulum, sehingga kurikulum berfungsi sebagai barang komoditas. Keempat, mitos kemajuan yang berkesinambungan. Untuk dapat maju, sekolah mengharuskan siswanya untuk selalu naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan kompetisi yg lebih ketat. Menurut Illich, untuk dapat mereformasi pendidikan, masyarakat harus mengubah persepsi mereka mengenai makna pendidikan (Illich dalam Naomi, 2003).

Pendapat Illich memang cukup radikal. Ia menginginkan reformasi pendidikan dalam masyarakat. Akan tetapi, secara riil, reformasi pendidikan sulit untuk dilakukan selama masyarakat masih mengagung-angungkan keberadaan lembaga pendidikan ini. Masyarakat modern masih memandang keberadaan status sosial tertentu, sehingga merekapun berlomba-lomba untuk meraih status yang tinggi melalui pendidikan ini. Hal ini ternyata dilegitimasi oleh sistem pendidikan melalui berbagai kebijakan pendidikan. Keberhasilan pendidikan hampir selalu menyaratkan nilai sebagai indikator utama. Inilah yang menyulitkan reformasi pendidikan secara umum. Dunia kerja juga selalu menyaratkan kepemilikan bukti berupa selebar ijazah atau nilai.

Pendidikan dan Kesadaran Individu

Paulo Freire seorang filsuf (pendidikan) memberikan beberapa argumentasi mengenai praktik pendidikan yang selama ini berkembang di masyarakat. Praktik pendidikan selama ini, lebih merupakan praktik pendidikan gaya bank yang lebih memposisikan siswa sebagai obyek pendidikan dan guru sebagai subyeknya. Bagi Freire, proses pendidikan semestinya harus memposisikan guru dan siswa sebagai subyek pendidikan, dan realitas sosial sebagai objeknya (Freire, 2002).

Hakikat tujuan dasar proses pendidikan adalah melakukan proses penyadaran terhadap individu. Penyadaran mengenai realitas yang ada

di sekitarnya. Individu, melalui proses penyadaran ini akan mampu berpikiran secara kritis mengenai permasalahan yang dihadapinya. Proses penyadaran ini akan terwujud ketika selama proses pembelajaran di sekolah, terjadi dialog antara siswa dan guru. Dialog ini akan menghilangkan dualisme antara pengajar dan pelajar, guru dan siswa, selain itu juga dapat menghapus dominasi guru di kelas (Freire, 2002). Praktik pendidikan juga harus membebaskan segala belenggu yang membatasi individu. Pendidikan harus mampu mengangkat individu dari permasalahan yang ada di sekitarnya (Freire dalam Naomi, 2003).

Praktik pendidikan gaya bank masih banyak dilakukan dalam sistem pendidikan di tanah air. Proses pembelajaran yang mengutamakan unsur dialog tidak banyak ditemukan di tanah air. Guru lebih banyak berceramah daripada menggunakan metode pembelajaran yang bersifat dialogis, seperti diskusi. Selain metode ini mudah dilakukan, di sisi lain guru juga mendapat tuntutan untuk menyelesaikan semua materi sesuai batas waktu yang telah ditentukan, sedangkan materi pelajaran cukup padat. Hal inilah yang memaksa mereka mengandalkan ceramah. Siswa juga dipaksa untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, akan tetapi proses pembelajaran yang telah dilaluinya kurang mendapat perhatian. Masyarakat lebih tertarik untuk menanyakan "berapa nilaimu" daripada mempermasalahkan "hari ini kamu belajar apa?"; "kamu tadi nyontek atau tidak waktu ulangan?"

Sinopsis Film Laskar Pelangi

Film LP mengambil *setting* di Desa Gantong, Kabupaten Gantong, Belitong Timur. Cerita dimulai ketika SD Muhammadiyah Gantong terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumatera Selatan jika tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Saat itu baru sembilan anak yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi tepat Harfan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu.

Cerita dimulai dari adegan ini, mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Harfan, pengenalan mereka yang luar biasa dan A Kiong yang justru tersenyum ketika

ditanyakan namanya oleh guru mereka yang biasa dipanggil Bu Mus (Muslimah). Kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai, kejadian ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertarungan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda delapan kilometer pulang pergi dari rumahnya ke sekolah (Anonim, 2008).

Laskar Pelangi –nama yang diberikan Muslimah akan kesenangan mereka terhadap pelangi— sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara, misalnya pembalasan dendam Mahar yang selalu dipojokkan kawan-kawannya karena kesenangannya pada *okultisme* yang membuahkan kemenangan manis pada karnaval 17 Agustus, dan kejeniusan luar biasa Lintang yang menantang dan mengalahkan Zulfikar, guru sekolah (milik orang) kaya –SD PN Timah— yang berijazah dan terkenal serta selalu memenangkan lomba cerdas cermat. Laskar Pelangi mengarungi hari-hari menyenangkan, tertawa dan menangis bersama. Kisah sepuluh kawanan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa "Einstein" cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian saat Ikal yang berjuang di luar Pulau Belitong kembali ke kampungnya. Ikal di akhir cerita, berhasil memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi di Paris (Anonim, 2008).

Kritik Sosial dalam Laskar Pelangi

Cerita singkat LP pada uraian sebelumnya, menyiratkan berbagai pelajaran berharga yang dapat dijadikan dasar pemikiran untuk perbaikan praktik pendidikan yang selama ini dilaksanakan, terutama di tanah air. Pada awal cerita, digambarkan adanya semangat yang tinggi dari anak-anak yang tinggal di pesisir untuk bersekolah. Namun, di sekolah dikisahkan bahwa Harfan selaku Kepala Sekolah Muhammadiyah Gantong, bermaksud untuk menutup sekolah dikarenakan jumlah siswa yang mendaftar tidak memenuhi kuota, sepuluh orang. Bagian ini menyiratkan bahwa praktik pendidikan, terutama di daerah pinggiran sering terkendala masalah administratif, seperti jumlah siswa minimal yang harus dipenuhi. Ketika banyak siswa dari kelas bawah yang ingin menikmati pendidikan dengan

biaya yang murah, namun karena sekolah menghadapi kendala administratif, nyaris sembilan anak tersebut kehilangan kesempatan untuk bersekolah selamanya. Namun pada akhirnya, muncul sosok Harun sebagai “penyelamat” sembilan anak tersebut, sehingga jumlah siswa yang masuk genap sepuluh orang. Kesepuluh anak itu berasal dari keluarga nelayan serta karyawan PN Timah. Tidak jauh dari SD Muhammadiyah, terdapat SD yang didirikan PN Timah, salah satu perusahaan nasional berskala besar pada saat itu. Cerita di SD PN Timah ini memberikan sebuah pemandangan yang sangat berbeda dengan kondisi SD Muhammadiyah tempat Laskar Pelangi bersekolah. SD PN Timah sudah dipenuhi siswa yang ingin bersekolah di sana, sebuah kontradiksi dengan SD Muhammadiyah yang justru kekurangan murid.

Kondisi SD PN Timah cukup eksklusif, dibatasi pagar tembok dengan pintu gerbang yang selalu ditutup ketika pelajaran berlangsung (Gambar 1). Siswa di SD itu terlihat bersih terawat, berseragam dan bersepatu. SD Muhammadiyah hanya menempati sebuah ruangan di gedung yang hampir roboh dan atapnya berlubang (Gambar 2), siswa di SD ini terlihat kotor, lusuh, berpakaian apa adanya, tidak berseragam dan tidak bersepatu. Bagian ini menunjukkan sebuah fenomena ketidaksetaraan akses pendidikan yang dapat diraih masyarakat. Kondisi ini sesuai dengan tesis yang diajukan para teoritis konflik bahwa lembaga sekolah telah menyebabkan sebuah kondisi ketidaksetaraan sosial (Haralambos dan Holborn, 2004). Anak dari golongan miskin hanya mampu memperoleh kesempatan bersekolah di SD yang memiliki fasilitas sangat minim. Anak dari golongan kaya akan mampu mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang lengkap.



Gambar 1. SD PN Timah dalam film Laskar Pelangi



Gambar 2. SD Muhammadiyah Gantong dalam film Laskar Pelangi

Kisah sepuluh anak dalam usahanya memperoleh pendidikan yang layak tidak berhenti di situ. Perjuangan mereka tetap berlanjut sampai memasuki kelas lima. Film ini menampilkan sosok Lintang yang memiliki otak yang cukup cerdas di antara teman-temannya. Kecerdasan ini ia peroleh berkat kegemarannya membaca segala sesuatu, buku maupun surat kabar.

Ada sebuah pelajaran menarik yang disampaikan melalui dialog antara Harfan dengan Zulfikar (Guru SD PN Timah) pada suatu siang. Zulfikar meragukan keberlangsungan SD Muhammadiyah di tahun mendatang, ketika Laskar Pelangi sudah lulus dari sekolah itu. Harfan dengan senang hati menanggapi keraguan-raguan Zulfikar tersebut. Berikut petikan dialog antara Harfan dan Zulfikar:

Zulfikar : Dari mana kalian mempertahankan sekolah ini? ...Biayanya? ...Gajinya?

Harfan : Zul..., sekolah ini.. adalah sekolah, di mana pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, bukan sekedar pelengkap kurikulum. Kecerdasan bukan dilihat dari nilai-nilai, dari angka-angka.. bukan! Tapi dilihat dari hati Zul..!

Petikan percakapan antara Harfan dan Zulfikar memberikan kritik terhadap praktik pendidikan ketika dunia pendidikan sekarang lebih mengedepankan pendidikan sains daripada pendidikan nilai. Pendidikan nilai kurang mendapat porsi yang seimbang selain itu, praktik pendidikan masih menggunakan nilai sebagai indikator kecerdasan siswa, nilai yang menjadi penentu layak tidaknya seorang siswa mendapat predikat "anak pintar". Nilai yang berupa angka ini saat ini menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi siswa manakala seorang siswa harus menghadapi tembok tinggi yang berupa ujian (nasional). Ujian (nasional) merupakan sarana untuk menyeleksi siswa untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nilai ini kemudian direpresentasikan dalam bentuk selebar ijazah dan sederet gelar. Simbol-simbol yang berupa ijazah atau gelar inilah yang kemudian menjadi apa yang disebut Bourdieu (2004) sebagai modal budaya, modal budaya yang tidak setiap golongan sosial mampu mendapatkannya. Selanjutnya, status sekolah akan menjadi modal simblolik bagi siswanya, seolah-olah bersekolah di sekolah favorit menjadi sebuah kebanggaan bagi dirinya.

Fenomena ketidaksetaraan dalam pendidikan kembali ditampilkan pada sebuah adegan. Pada suatu hari, Mahmud –guru SD PN Timah– sedang membagikan kalkulator pada siswanya ketika berlangsung pelajaran Matematika. Kalkulator itu dibagikan secara gratis. Cerita langsung dilanjutkan dengan adegan yang berbalik 180 derajat, yaitu saat pelajaran Matematika di SD Muhammadiyah. Muslimah pada saat itu tengah mengajak Laskar Pelangi belajar berhitung menggunakan lidi yang diikat kecil-kecil. Dua adegan yang saling bertolak belakang ini menyampaikan kritik mengenai ketidaksetaraan yang disebabkan perbedaan fasilitas belajar, lebih khusus lagi perbedaan fasilitas belajar antara anak orang kaya dan anak orang miskin. Orang miskin dengan berbagai keterbatasan hanya mampu menggunakan lidi sebagai alat bantu berhitung. Ini adalah sebuah ironi ketika dua SD yang berdekatan, di dalamnya seolah-olah ada tembok tinggi yang mampu membedakan anak-anak di sekitarnya. Inilah realitas yang sering dilihat dalam wajah pendidikan nasional kita. Sekolah adalah lembaga eksklusif yang dibatasi tembok tinggi, pagar besi yang siap menutup

akses orang miskin untuk dapat bersekolah di tempat yang cukup mewah. Pagar tembok dengan alih-alih keamanan, justru telah membatasi anak dengan realitas di sekitarnya, seolah-olah mereka sedang dikarantina dalam proses mendapatkan pengetahuan. Lingkungan sosial di sekitar sekolah, seharusnya menjadi bahan belajar bagi siswa (Freire, 2002). Hal ini juga merupakan sebuah kritik yang disampaikan dalam film LP. Muslimah dan Harfan juga sering mengajak Laskar Pelangi belajar di tengah panas matahari, belajar di kebun, bahkan Laskar Pelangi diperbolehkan belajar dan bermain di pantai (Gambar 3). Satu adegan yang memperkuat analisis ini adalah pada saat Lintang dan Ikal mencoba bermain di halaman SD PN Timah, yang kemudian justru diusir oleh penjaga sekolah karena ia bukan siswa SD PN Timah. Adegan lain adalah saat Lintang dan Ikal berdiri di pagar SD PN Timah yang tertutup. Mereka hanya mampu berbicara dengan salah satu temannya di SD tersebut dari balik pagar.



Gambar 3. Belajar tidak harus di dalam ruangan

Perspektif interaksionisme simbolik dapat terlihat melalui sosok Muslimah dan Harfan selama menemani Laskar Pelangi. Muslimah dan Harfan digambarkan sebagai sosok guru yang sangat dekat dengan Laskar Pelangi. Mereka juga sangat menghargai keberagaman karakter, kemampuan maupun bakat yang dimiliki masing-masing anak didiknya (Laskar Pelangi). Mahar yang menyenangi seni, ditunjuk Muslimah sebagai ketua tim yang akan diikuti dalam lomba karnaval pada acara 17 Agustus. SD Muhammadiyah akhirnya memenangkan lomba karnaval tersebut, mengalahkan tim dari SD PN Timah, juara bertahan dalam lomba yang sama. Satu hal yang dapat dibanggakan dari Laskar Pelangi selain

mengalahkan SD PN Timah adalah usaha yang dilakukan, ternyata hanya menggunakan alat-alat sederhana, yaitu daun yang dijadikan hiasan (Gambar 4). Hal ini tidak dijumpai pada kontestan lain yang justru menggunakan alat modern (drumband) dengan seragam yang dapat dikatakan mahal untuk ukuran Laskar Pelangi (Gambar 5). Bagian film ini menginspirasi bahwa untuk dapat berhasil, tidak memerlukan peralatan yang mahal. Cerita ini sekaligus mengkritik secara tajam lembaga pendidikan yang menggunakan peralatan modern (dan mahal) dalam menggelar sebuah lomba atau acara.



Gambar 4. Penampilan Laskar Pelangi dalam lomba 17-an



Gambar 5. Penampilan siswa SD PN Timah dalam lomba 17-an

SD Muhammadiyah memperoleh surat dari pengawas sekolah Sumatera Selatan untuk mengikuti ulangan umum di SD PN Timah, dengan kata lain, siswa SD Muhammadiyah harus bergabung dengan SD PN Timah. Proses interaksi simbolik juga terjadi dalam cerita ini. Film LP menggambarkan fenomena yang sangat kontras ketika Laskar Pelangi harus mengikuti ulangan umum dalam satu tempat dengan siswa dari PN

Timah. Laskar Pelangi terlihat tidak percaya diri ketika harus berinteraksi dengan siswa PN Timah yang berseragam lengkap dan bersepatu, sedangkan Laskar Pelangi berpakaian apa adanya dan hanya memakai sandal. Muslimah pada saat itu juga sempat berpapasan dengan Kepala SD PN Timah, namun kepala sekolah tersebut terkesan angkuh, tidak bersalaman dengan Muslimah dan hanya berjalan biasa tanpa menyapa. Harfan-pun terlihat sangat menghormati sang kepala sekolah SD PN Timah. Inilah sebuah gambaran proses interaksi simbolik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan status sekolah. Gurupun PN Timah-pun merasa sebagai orang yang patut dihormati karena ia memimpin sekolah berkualitas di daerah tersebut.

Bakri yang selama ini menemani Muslimah dan Harfan dalam mengajar Laskar Pelangi, akhirnya memutuskan untuk pindah, menerima tawaran mengajar di SD Bangka. Muslimah dan Harfan kemudian harus mengajar berdua. Namun, Harfan beberapa hari kemudian meninggal dunia di kelas, tinggallah Muslimah sendirian menemani Laskar Pelangi. Cerita ini menggambarkan beratnya perjuangan guru yang harus mengajar di daerah dengan fasilitas yang serba terbatas, bahkan sering kali gaji dibayar terlambat. Inilah yang dialami Muslimah.

Kemenangan Laskar Pelangi dalam lomba 17-an, cukup memotivasi mereka untuk kemudian mencoba mengikuti lomba cerdas cermat dan harus berhadapan dengan siswa dari SD PN Timah, juara bertahan. Laskar Pelangi akhirnya juga tampil dalam lomba cerdas cermat. Lintang yang memiliki kecerdasan dalam masalah berhitung, akhirnya mampu membawa SD Muhammadiyah sebagai pemenang setelah sebelumnya Lintang harus membuktikan kebenaran jawabannya karena berbeda dengan jawaban yang dimiliki juri sehingga Lintang dituduh melakukan kecurangan. Kemenangan SD Muhammadiyah ini menggeser posisi SD PN Timah sebagai juara bertahan. Inilah akhir cerita kesuksesan SD Muhammadiyah. Kemenangan Laskar Pelangi dalam lomba cerdas cermat memberikan sebuah inspirasi bahwa sekolah yang tidak favourite, murah serta diajar oleh guru yang "tidak kompeten", ternyata tidak kalah dengan sekolah yang mahal yang memiliki fasilitas

lengkap. Sekolah mahal tidak selamanya lebih baik daripada sekolah yang murah, dengan fasilitas apa adanya. Kunci keberhasilan individu dalam memperoleh kesuksesan tidak selamanya ditentukan oleh di mana ia bersekolah.

Ketika Lintang pulang dari mengikuti lomba cerdas cermat, ia tidak mendapati ayahnya pulang yang tidak pulang sejak Lintang berangkat untuk mengikuti lomba. Lintang ternyata harus kehilangan ayahnya di saat ia sedang berbahagia karena memenangkan lomba cerdas cermat. Lintang akhirnya harus merelakan keinginannya untuk melanjutkan sekolah, meskipun ia termasuk anak yang sangat cerdas.

Dua belas tahun kemudian diceritakan bahwa Ikal berhasil menyelesaikan studinya di luar Belitong, dan Lintang menjadi pedagang di pasar. Kedua anggota Laskar Pelangi itupun bertemu kembali ketika Ikal menyempatkan diri pulang ke Belitong untuk mengabarkan bahwa ia akan melanjutkan studi ke Perancis dengan beasiswa yang berhasil diraihnya. Kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh kelas sosialnya atau karena seseorang bersekolah di sekolah favorit.

Keberhasilan SD Muhammadiyah mengantarkan sepuluh siswanya merupakan sebuah cerita yang mematahkan pandangan masyarakat bahwa sekolah favorit akan memberikan jaminan kesuksesan, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit (yang mahal). Pandangan inilah yang kemudian memunculkan proses kapitalisasi pendidikan, ketika sekolah favorit banyak diminati masyarakat karena dianggap mampu memberikan jaminan keberhasilan, maka sekolahpun akhirnya memasang biaya yang tinggi. Sesuai hukum permintaan, ketika permintaan tinggi, maka harga akan tinggi, maka sekolah sebagai lembaga pendidikan akan mengikuti hukum ini. Sekolah favorit akan memberikan "iming-iming" berupa fasilitas yang lengkap, guru atau dosen yang bergelar dan berkualitas sampai memberikan jaminan kerja bagi lulusannya. Sekolah yang tidak favorit, dengan fasilitas yang tidak lengkap, guru yang tidak berkualitas serta letaknya yang berada di pinggir, akan sepi. Masyarakat tidak akan melirik profil sekolah seperti ini karena dianggap tidak mampu membawa anaknya menuju pintu keberhasilan.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Film karya Riri Riza yang diadaptasi dari novel Laskar Pelangi mengambil pendidikan sebagai isu yang diangkat sebagai pokok cerita. Beberapa kritik yang coba disampaikan melalui film ini di antaranya adalah: 1) Otonomi pendidikan yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Kritik ini disampaikan di awal cerita ketika Harfan berencana menutup SD Muhammadiyah karena jumlah siswa yang mendaftar tidak sampai sepuluh orang, sesuai dengan aturan yang disampaikan pemerintah Sumatera Selatan saat itu. Namun, sesaat kemudian Harun datang untuk bersekolah di SD ini, sehingga jumlah siswa yang mendaftar genap sepuluh orang. Jumlah siswa yang dididik, ternyata masih menjadi dasar utama untuk menentukan layak tidaknya sebuah sekolah tetap dibuka. Hakikatnya, kualitas sebuah sekolah tidak harus dilihat dari jumlah siswa yang masuk. Namun faktor kuantitas selalu menjadi pertimbangan utama, faktor kualitas seolah dikesampingkan; 2) Eksklusivitas fungsi sekolah. Sekolah cenderung menjadi eksklusif, terutama sekolah favorit yang mahal. Sekolah favorit hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang dari golongan atas. Sekolah ini dilengkapi dengan fasilitas yang serba luks, dan dibatasi dengan pagar tinggi, seolah-olah untuk dapat belajar, seorang anak harus dikarantina di gedung sekolah; 3) Formalisasi pendidikan. Sekolah masih diyakini sebagai satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Ijasah dan gelar masih menjadi simbol-simbol yang ingin diraih oleh anggota masyarakat, sehingga tidak heran apabila banyak dijumpai anggota masyarakat yang berupaya mendapat simbol-simbol tersebut dengan cara instan demi meraih kesuksesan; 4) Pendidikan formal yang meninggalkan hakikat pendidikan itu sendiri. Sektor pendidikan lebih banyak memfokuskan pada sisi kuantitas untuk mengukur keberhasilan atau kualitas seorang siswa. Kualitas ini lebih ditunjukkan melalui nilai hasil ujian dalam raport. Pendidikan juga hanya dimaknai sebagai jalan untuk mencari pekerjaan yang layak dan mengejar status sosial; dan 5) Dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit. Dikotomi ini telah memunculkan komersialisasi pendidikan. Sekolah favorit akan memasang biaya mahal kepada calon siswanya dengan menawarkan berbagai fasilitas luks.

Saran

1) Kebijakan mengenai desentralisasi pendidikan seharusnya bukanlah hanya sebatas wacana saja. Kebijakan ini seharusnya diimplementasikan secara menyeluruh. Kondisi demografis dan geografis setiap daerah sangat berbeda, sudah selayaknya setiap daerah diberi otonomi khusus dalam sektor pendidikan. 2) Faktor kualitas seharusnya lebih diutamakan daripada faktor kuantitas terutama dalam menentukan kinerja suatu lembaga pendidikan (sekolah). Kinerja sekolah seharusnya tidak dilihat hanya sebatas kemampuan menyerap siswa, kemampuan meluluskan siswanya atau kemampuan mencapai standar nilai tertentu. Kinerja sekolah seharusnya dilihat sesuai dengan proses yang telah dilakukan sekolah yang bersangkutan, bukan pada hasil akhir yang lebih mengutamakan kuantitas. Hal inilah yang memunculkan *image* sekolah favorit dan tidak favorit. 3) Perlu ada reinterpretasi mengenai tujuan dan fungsi pendidikan bagi masyarakat.

Sebagian besar anggota masyarakat masih memaknai pendidikan (sekolah) sebagai sarana untuk meraih pekerjaan atau kesuksesan. Pandangan ini harus segera diubah dengan mengembalikan pendidikan pada fungsi dan hakikatnya sebagai sarana untuk meraih ilmu, bukan meraih pekerjaan. Langkah ini memerlukan saling keterkaitan antarsistem, terutama dunia kerja. Hampir semua dunia kerja, selalu menyaratkan adanya ijazah sebagai bukti "kemampuan individu". Seolah-olah dengan berbekal selembar ijazah, seseorang dapat meraih segalanya. 4). Kemampuan seseorang seharusnya tidak dilihat dari perolehan nilai-nilai raport atau IPK. Kemampuan seharusnya dilihat dari proses belajar yang telah dilaluinya selama menempuh pendidikan di sekolah. Setiap siswa memiliki bakat dan keunikan yang berbeda dan tidak dapat distandarkan, sehingga mengukur kemampuan setiap siswa dengan standar yang sama sangat tidak sesuai.

Pustaka Acuan

- Anonim. 2008. *Sinopsis Film Laskar Pelangi*, diakses melalui situs: www.laskarpelangithemovies.com tanggal 1 Juni 2009.
- Bourdieu, Pierre. 2004. The Forms of Capital. dalam *The Routledge Falmer Reader in Sociology of Education*. Stephen J. Ball (ed.). The Routledge Falmer, London.
- Badan Pusat Statistik. 2008a. *Angka Partisipasi Sekolah (%)*. situs: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=34. diakses tanggal 12 Desember 2009.
- Badan Pusat Statistik. 2008b. *Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas (%)*. situs: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=34. diakses tanggal 12 Desember 2009.
- Freire, Paulo. 2002. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (diterjemahkan oleh Fuad dari *The Politics of Education: Culture, Power and Liberation*).
- Haralambos dan Holborn. 2004. *Sociology: Themes and Perspectives Sixth Edition*. Harper Collins Publisher, London.
- Henslin, James M. 2006. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi Edisi 6 Jilid 2*. Erlangga, Jakarta (diterjemahkan oleh Kamanto Sunarto dari *Essential of Sociology: a Down-to-earth Approach 6th Edition*).
- Illich, Ivan. 2000. *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (diterjemahkan oleh Sony Keraf dari *Deschooling Society*).
- Meighan, Roland. 1981. *Sociology Of Educating*. Holt Education, New York.
- Naomi, Omi Intan (ed.). 2003, *Menggugat Pendidikan: Fundamentalisme Konservatif Liberal Anarkis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.